

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejauh mana fenomena gerakan sosial mulai dari gerakan sosial klasik, neo klasik dan gerakan sosial baru yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Di era kontemporer gerakan sosial semakin dinamis dan berfokus pada isu krusial seperti isu perubahan iklim, hak asasi manusia, dan isu politik yang sering kali berkaitan dengan kebijakan timpang dari pemerintah suatu negara yang memicu amarah dan protes masyarakat seperti yang terjadi di Indonesia dan Nepal pada Agustus hingga September 2025, penyebaran isu-isu tersebut berlangsung sangat cepat karena dipengaruhi oleh media sosial sebagai alat mobilisasi massa yang efektif di era digital. Oleh karena itu, Untuk dapat menganalisis lebih dalam terkait peran media sosial dalam gerakan sosial di kedua negara tersebut diperlukan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini untuk dijadikan sebagai pedoman serta pembanding penelitian yang akan penulis teliti.

2.1. Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi Pasca Perang Dingin

Kajian terdahulu mengenai perkembangan teknologi di era globalisasi pasca perang dingin menunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi serta informasi merupakan faktor utama dalam membentuk pola interaksi sosial yang semakin melampaui batas-batas negara. Dengan berakhirnya perang dingin menandai munculnya fase baru dalam globalisasi yang tidak hanya ditopang oleh dinamika ekonomi global tetapi juga oleh percepatan arus informasi dan komunikasi berbasis teknologi digital. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi digital dapat dipahami sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, berkelanjutan dan melintasi batas negara, serta menjadi salah satu syarat utama bagi terbentuknya relasi sosial dan politik dalam ruang global.

Sukri Tamma (2022) menjelaskan bahwa dengan berakhirnya perang dingin menandai adanya fase baru dalam globalisasi yang ditandai dengan adanya intensifikasi hubungan sosial yang melintasi batas-batas negara. Terutama melalui perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya proses interaksi secara cepat, serentak dan melampaui batas geografis. Kondisi tersebut kemudian membuka terciptanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi aktor non-negara, termasuk masyarakat sipil, untuk dapat terlibat dalam dinamika sosial dan politik yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, kajian

Tamma memberikan landasan konsepsi yang penting dalam memahami peran perkembangan teknologi sebagai faktor pendukung munculnya berbagai bentuk gerakan sosial kontemporer yang semakin mengandalkan media komunikasi modern (Tamma, 2022).

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa arus percepatan globalisasi tapi juga menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap struktur sosial dan budaya, sebagaimana menurut Castells (2015) melalui konsep *network society* bahwa masyarakat kontemporer semakin terorganisasi melalui jaringan digital, di mana komunikasi berlangsung secara cepat, global dan terdesentralisasi. Di dalam masyarakat jaringan, aktor yang memiliki akses dan kontrol terhadap infrastruktur digital termasuk platform komunikasi serta arus informasi memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah dinamika politik dan wacana publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan peluang partisipasi tetapi juga menghadirkan sebuah bentuk ketimpangan baru yang berbasis kontrol informasi dan kapasitas teknologi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi cara masyarakat sipil berpartisipasi dalam ruang publik digital dan gerakan sosial transnasional. (Castells, 2015).

Memasuki fase transisi sejak awal abad ke-21, perkembangan teknologi global semakin dipengaruhi oleh keterbukaan ekonomi dan integrasi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Skare dan Soriano (2021) menguraikan bahwa negara-negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan internasional, investasi asing, dan konektivitas global cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengadopsi teknologi digital. Tetapi kemudian, dampak globalisasi terhadap digitalisasi tidak berlangsung secara seragam. Faktor internal seperti kualitas kelembagaan, kebijakan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap penelitian dan pengembangan menjadi penentu utama bagi keberhasilan transformasi digital di masing-masing negara (Skare & Soriano, 2021).

Dalam konteks globalisasi tersebut, Van Dijk (2020) menekankan adanya fenomena *digital divide*, yaitu kesenjangan dalam memperoleh akses, keterampilan dan dalam pemanfaatan teknologi digital. Kemajuan teknologi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan sosial, karena kelompok masyarakat dengan keterbatasan infrastruktur digital, sumber daya ekonomi, dan literasi teknologi cenderung tertinggal dalam memanfaatkan peluang digital. Oleh karena itu, literasi teknologi menjadi syarat penting agar perkembangan teknologi dapat berkontribusi secara inklusif terhadap kesejahteraan sosial serta partisipasi masyarakat dalam ruang digital global khususnya di negara-negara berkembang (Dijk, 2020).

Seiring dengan semakin kompleksnya ketergantungan masyarakat terhadap sistem digital, isu keamanan siber muncul sebagai sebuah tantangan struktural dalam fase keberlanjutan dari evolusi teknologi global. Kshetri & Voas (2025) kemudian menjelaskan bahwa transformasi digital telah memperluas kerentanan terhadap berbagai ancaman siber, seperti adanya peretasan, pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi bahkan kejahatan digital lintas negara. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi, politik dan keamanan nasional. Oleh karena itu, Kshetri menekankan pentingnya tata kelola keamanan siber yang melibatkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara menjadi sebuah kebutuhan penting dalam menjaga keberlanjutan transformasi digital global (Kshetri & Voas, 2025).

Kemudian menurut Aichner, Grunfelder, Maurer dan Jegeni (2021) kemunculan media sosial tidak dapat dilepaskan dari adanya dinamika globalisasi teknologi informasi yang mengalami percepatan sejak pertengahan dekade 1990-an, seiring dengan proses komersialisasi internet dan meningkatnya tingkat konektivitas global. Pada periode kontemporer sejak tahun 2010-an perkembangan teknologi digital ditandai dan didominasi oleh media sosial sebagai sebuah infrastruktur komunikasi global. Media sosial berkembang sebagai ruang komunikasi berbasis komunitas daring dan jejaring sosial virtual, sebelum kemudian mengalami transformasi bertahap menjadi platform digital yang semakin kompleks dengan fungsi yang semakin meluas ke ranah sosial, ekonomi hingga politik. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya pergeseran teknologi komunikasi dari sarana pertukaran informasi antar individu menjadi sebuah ruang publik digital yang memungkinkan komunikasi yang berskala lebih luas lagi, adanya partisipasi aktif pengguna serta pembentukan jaringan sosial yang melintasi batas negara. (Aichner et al., 2021).

Sejalan dengan kajian sebelumnya Qadir dan Ramli (2024) kemudian menegaskan bahwa media sosial merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi global, media sosial berkembang sejalan dengan meluasnya penggunaan internet dan penerapan konsep Web 2.0 sejak awal dekade 2000-an. Kehadiran platform awal seperti Friendster dan MySpace mencerminkan tahap awal integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian berevolusi menjadi sistem komunikasi global melalui platform-platform yang lebih kompleks seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan Youtube. Dengan demikian, kajian ini memberikan dasar empiris yang penting untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi komunikasi pasca perang dingin dalam kerangka globalisasi yang telah melahirkan media sosial sebagai sebuah infrastruktur komunikasi

digital yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika sosial kontemporer (Qadir & Ramli, 2024)

Berdasarkan telaah dari beberapa kajian terdahulu, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi pada era globalisasi pasca perang dingin memainkan peran struktural yang signifikan dalam membentuk pola komunikasi, interaksi sosial, serta partisipasi masyarakat dalam ruang global. Dalam kerangka ini, kemajuan teknologi digital menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya media sosial sebagai infrastruktur komunikasi kontemporer yang semakin melekat dalam kehidupan sosial, budaya dan politik masyarakat modern. Namun demikian, implikasi dari perkembangan teknologi tersebut tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas institusional yang berbeda di setiap negara. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teknologi global pasca perang dingin menjadi syarat penting untuk dapat menganalisis pemanfaatan media sosial dalam konteks gerakan sosial, khususnya melalui pendekatan studi perbandingan antara Indonesia dan Nepal.

2.1.1. Tabel Tinjauan Pustaka

No.	Penulis	Hasil Kajian	Jurang Kajian
1.	Tamma (2022); Castells (2015); Skare & Soriano (2021)	Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa berakhirnya perang dingin menandai fase baru dari globalisasi yang ditopang oleh percepatan teknologi komunikasi digital. Teknologi memungkinkan intensifikasi interaksi lintas negara, terbentuknya jaringan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan aktor non-negara dalam dinamika sosial dan politik global.	Kajian-kajian ini belum mengkaji secara spesifik peran media sosial sebagai instrumen mobilisasi gerakan sosial, khususnya dalam konteks negara berkembang dan demokrasi transisional seperti Indonesia dan Nepal.

2.	Van Dijk (2020); Kshetri (2021)	Kedua kajian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak bersifat inklusif karena adanya kesenjangan digital dan risiko keamanan siber. Ketimpangan akses teknologi mempengaruhi peluang partisipasi politik dan sosial, sementara kerentanan digital berdampak pada stabilitas negara dan masyarakat.	Belum dijelaskan bagaimana ketimpangan digital dan risiko keamanan ini mempengaruhi kapasitas masyarakat sipil dalam membangun gerakan sosial berbasis media sosial.
3.	Aichner et.al (2021); Qadir & Ramli (2024)	Media sosial berkembang sebagai hasil transformasi teknologi komunikasi global dan Web 2.0, serta menjadi ruang publik digital yang memungkinkan partisipasi sosial, terbentuknya jejaring dan komunitas politik lintas batas.	Kajian ini masih bersifat deskriptif terhadap perkembangan media sosial dan belum menempatkannya sebagai variabel utama dalam analisis dinamika gerakan sosial politik.

Tabel 2.1.0.1 Tinjauan Pustaka

2.2. Gerakan Sosial di Indonesia Pasca Reformasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, media sosial hadir sebagai platform penyebaran informasi yang mampu melintasi batas-batas geografis dan politik negara. Dalam perkembangannya, media sosial tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berevolusi sebagai instrumen yang strategis bagi gerakan sosial di ranah digital. Berbagai kajian menunjukkan bahwa di Indonesia, khususnya pasca reformasi 1998, media sosial semakin sering dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi massa, pembentuk opini publik serta penguatan gerakan sosial yang terus berlanjut hingga saat ini.

Berdasarkan kajian Prasisko (2016) perkembangan gerakan sosial baru di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan bagian dari proses demokratisasi yang masih terus berlangsung sampai saat ini dan belum sepenuhnya selesai. Tahap awal gerakan sosial pasca reformasi ditandai dengan munculnya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang berperan penting dalam mengakhiri kekuasaan rezim orde baru. Pada periode tersebut, meskipun aksi-aksi demonstrasi terjadi secara luas di berbagai wilayah dan berada dalam situasi ketegangan sosial yang tinggi, pola pengorganisasian gerakan mahasiswa cenderung bersifat fleksibel, serupa dan tidak terpusat. Kondisi tersebut merepresentasikan bentuk mobilisasi politik kolektif yang lebih menekankan partisipasi bersama dibandingkan tindakan anarkis yang terorganisir. Memasuki periode pasca 2000-an, seiring dengan berlangsungnya proses konsolidasi demokrasi dan diberlakukannya mekanisme pemilihan umum secara langsung sejak tahun 2004, gerakan sosial di Indonesia mengalami perubahan menuju bentuk gerakan sosial baru yang bersifat lebih kondusif dan mengedepankan prinsip non-kekerasan. Pada fase ini, isu-isu yang diangkat menjadi lebih spesifik seperti persoalan pemenuhan hak warga negara, persoalan lingkungan hidup serta kritik terhadap kebijakan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari Gerakan Bali Tolak Reklamasi yang berlangsung dari tahun 2013-2016 dan Gerakan Selamatkan Rembang di tahun 2014-2017 yang lebih menekankan pada strategi protes damai, penggunaan media sosial, pemanfaatan simbol-simbol budaya lokal, konsolidasi gerakan dan platform petisi daring sebagai sebuah sarana penguatan solidaritas. Kajian ini menegaskan bahwa karakteristik yang dominan dari gerakan sosial pasca reformasi di Indonesia tidak berorientasi pada tindakan anarkisme melainkan pada praktik aksi kolektif yang partisipatoris dan berlangsung damai dalam merespons serta mengkritisi kebijakan negara (Prasisko, 2016).

Sejalan dengan hal tersebut, Khusniah (2024) menegaskan bahwa kejatuhan rezim orde baru tidak dapat dilepaskan dari adanya tekanan kolektif yang dibangun oleh gerakan sosial masyarakat sipil, yang mulai tumbuh dari kesadaran kritis terhadap praktik pemerintahan yang otoriter, besarnya dominasi negara atas ruang publik dan maraknya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini,, gerakan mahasiswa bersama dengan masyarakat sipil diposisikan sebagai aktor sentral yang berkontribusi dalam mendorong perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis. Lebih lanjut, Khusniah juga menegaskan bahwa dinamika gerakan sosial pasca reformasi tidak berhenti hanya pada momen pergantian rezim saja melainkan terus berlanjut sebagai sebuah kekuatan yang mengawal terciptanya demokrasi melalui berbagai bentuk advokasi kebijakan, pengawasan

terhadap kekuasaan dan tuntutan berkelanjutan atas pemenuhan hak asasi manusia. Hubungan antara gerakan sosial serta proses demokratisasi tersebut bersifat timbal balik di mana gerakan sosial berperan sebagai penggerak transformasi sosial politik sekaligus sebagai penopang keberlanjutan demokrasi dalam dinamika politik Indonesia kontemporer (Khusniah, 2024).

Memasuki dekade 2010-an, dinamika gerakan sosial di Indonesia menunjukkan percepatan baru, terutama dengan semakin intensifnya penggunaan media sosial sebagai alat dalam perjuangan politik. Salah satu contoh pentingnya adalah Gerakan Gejayan Memanggil pada tahun 2019 merupakan titik balik yang esensial dalam sejarah evolusi gerakan sosial di Indonesia. Gerakan tersebut menandai adanya pergeseran dari gerakan sosial lama yang berfokus pada konflik kelas dan material menuju gerakan sosial baru yang menitikberatkan pada isu-isu identitas, lingkungan, kemanusiaan, keadilan sosial dan hak-hak perempuan. Gerakan ini bersifat plural, tidak terstruktur secara birokratis serta menekankan pada identitas kolektif sebagai basis mobilisasi. Mahasiswa berperan sebagai aktor utama dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah, sementara ideologi tidak lagi menjadi landasan utama, melainkan berfungsi sebagai framing untuk mobilisasi partisipasi yang lebih luas melalui pendekatan yang pragmatis (Nofrima & Qodir, 2021).

Gerakan Gejayan Memanggil 2019 muncul sebagai sebuah respons dari adanya ketidakpuasan publik terhadap aturan yang dibuat pemerintah, seperti penolakan terhadap revisi RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, UU KPK, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertahanan, RUU Ketenagakerjaan, serta mendesak pengesahan RUU PKS dan Pembatalan UU Sumber Daya Air. Gerakan ini melibatkan koalisi dari berbagai organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Himpunan Mahasiswa Islam Dipo (HMI DIPO), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dan juga masyarakat sipil. Prosesnya berlangsung secara terbuka, tanpa adanya pemimpin tunggal melalui konsolidasi untuk dapat menyatukan isu yang beragam mulai dari isu hak asasi manusia, isu kekerasan hingga isu agraria untuk dapat membangun solidaritas horizontal melawan oligarki dan korporasi represif. Gerakan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 15.000 demonstran pada saat itu melalui tagar #GejayanMemanggil yang kemudian viral dan trending di platform media sosial. Fenomena ini menandai adanya pergeseran dari mobilisasi tradisional menuju mobilisasi digital di mana teknologi berperan penting dalam

memperluas jaringan, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan partisipasi sosial politik masyarakat (Nofrima & Qodir, 2021).

Kajian lain yang menyoroti gerakan sosial kontemporer adalah kajian Adhipermana dan Subono (2022) mengenai gerakan #ReformasiDiKorupsi yang terjadi pada September 2019. Gerakan ini muncul sebagai respons kolektif terhadap pelemahan agenda pembatasan korupsi dan kemunduran demokrasi, khususnya terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa kebijakan negara yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Gerakan ini melibatkan konsolidasi mahasiswa, masyarakat sipil dan berbagai elemen publik yang memanfaatkan mobilisasi massa, simbol, serta narasi-narasi perlawanan anti korupsi melalui media sosial sebagai ruang artikulasi tuntutan dan penguatan solidaritas. Meskipun gerakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran publik dan memperluas partisipasi politik, dampak struktural yang dihasilkan relatif terbatas akibat kuatnya resistensi elite politik dan terkonsolidasinya kepentingan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan sosial pasca reformasi bersifat partisipatif dan berbasis masyarakat sipil, namun tetap menghadapi keterbatasan daya tekan dalam struktur demokrasi elektoral Indonesia (Adhipermana & Subono, 2022).

Selanjutnya, Zaenuri dan Mar'iyah (2025) mengkaji terkait perkembangan gerakan sosial politik di Indonesia pasca reformasi melalui tinjauan terhadap gerakan politik partai buruh yang menentang kebijakan terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja selama periode 2021 hingga 2024. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik gerakan sosial pasca reformasi tidak lagi terbatas pada mobilisasi massa di ruang publik, melainkan mengalami perubahan menuju strategi politik non-parlementer yang lebih terstruktur, beragam dan responsif terhadap dinamika kebijakan yang ada. Dalam hal ini, Partai buruh sebagai partai politik non-parlemen berfungsi sebagai aktor gerakan sosial dan kelompok penekan (pressure group) dengan memanfaatkan berbagai akses perjuangan, seperti aksi demonstrasi, pembentukan aliansi dengan organisasi buruh dan masyarakat sipil, penggunaan media massa dan media sosial, serta jalur konstitusional melalui pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Temuan dalam kajian ini menegaskan bahwa gerakan sosial pasca reformasi semakin menunjukkan kecenderungan terinstitusionalisasi dan berbasis hukum, tanpa kehilangan karakter partisipatif masyarakat sipil sebagai kekuatan demokratis (Zaenuri & Mar'iyah, 2025).

Kajian berikutnya menyoroti terkait gerakan demonstrasi di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 25 Agustus hingga 2 September 2025 oleh Alisya, Sygy,

Rahmawati dan Maharani (2025) melihat bahwa gerakan tersebut muncul sebagai sebuah respons atas menurunnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Rangkaian aksi dalam gerakan tersebut tidak sekadar ekspresi emosional dari masyarakat, melainkan merupakan artikulasi kekecewaan kolektif terhadap melemahnya peran representatif dari lembaga legislatif dalam sistem demokrasi. Gerakan ini melibatkan kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, serta warga dari berbagai macam latar belakang profesi yang secara simultan memanfaatkan ruang fisik melalui aksi demonstrasi dan juga ruang digital melalui media sosial sebagai sebuah media dalam menyampaikan tuntutan, seperti adanya penggunaan tagar #BubarkanDPR serta seruan reformasi legislatif. Fenomena tersebut mencerminkan adanya pola pergeseran partisipasi politik masyarakat pasca reformasi dari yang semula bergantung pada mekanisme formal menuju praktik aksi kolektif di ruang publik dan ruang virtual (Alisyia et al., 2025)

Sejalan dengan kajian tersebut kemudian Rizky, Wirantaka, Yuliandra, Masyur dan Supriyono (2025) mengkaji terkait peran media sosial dalam dinamika aksi unjuk rasa nasional di Indonesia dengan rentang waktu antara bulan Agustus hingga September 2025 yang menjadi salah satu fase paling penting dalam gerakan sosial kontemporer pasca reformasi. Dalam gerakan ini media sosial terutama platform X (Twitter), TikTok dan Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media pertukaran informasi melainkan telah berkembang menjadi sebuah ruang publik digital yang mempunyai pengaruh signifikan dalam proses mobilisasi massa, pembentukan opini publik serta penguatan identitas kolektif gerakan dengan memanfaatkan tagar, konten visual dan juga narasi digital media sosial mampu membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah dengan beragam latar belakang sosial. Kajian ini menegaskan adanya sifat ambivalen dari media sosial, karena di satu sisi media sosial dapat mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi demokratis, tetapi di sisi lain juga berpotensi menjadi tempat penyebaran disinformasi, polarisasi wacana serta eskalasi konflik sosial. Dinamika ini menggambarkan karakter gerakan sosial pasca reformasi yang semakin terintegrasi dengan ruang digital dan tidak dapat dilepaskan dari tantangan etis dalam praktik demokrasi digital kontemporer (Rizky et al., 2025)

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial di Indonesia pasca reformasi mengalami perubahan yang signifikan dari segi aktor, isu, strategi serta media dalam melakukan perjuangan. Media sosial dalam hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pola mobilisasi, memperluas

partisipasi politik serta menciptakan ruang publik alternatif bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, pemahaman terkait dinamika gerakan sosial Indonesia pasca reformasi menjadi landasan penting dalam menganalisis pengaruh media sosial terhadap gerakan sosial khususnya dalam kerangka studi perbandingan dengan konteks politik Nepal.

2.2.1. Tabel Tinjauan Pustaka

No.	Penulis	Hasil Kajian	Jurang Kajian
1.	Prasisko (2016);Khusniah (2024)	Gerakan sosial di Indonesia pasca 1998 berperan penting dalam transisi dan konsolidasi demokrasi, dengan pola mobilisasi damai, partisipatif dan berbasis masyarakat sipil.	Kajian-kajian ini belum menyoroti secara mendalam transformasi gerakan sosial akibat digitalisasi dan penggunaan media sosial.
2.	Nofrima & Qodir (2021); Adhipermana & Subono (2022); Alisya et.al (2025); Rizky et.al (2025)	Media sosial menjadi sarana mobilisasi massa, pembentukan opini publik, dan penguatan identitas kolektif dalam gerakan sosial kontemporer. Gerakan sosial kini terintegrasi antara ruang fisik dan juga digital.	Kajian-kajian tersebut masih berfokus pada konteks nasional dan belum dilakukan analisis komparatif lintas negara, khususnya dengan negara demokrasi baru seperti Nepal.

Tabel 2.0.2.1 Tinjauan Pustaka

2.3. Gerakan Sosial di Nepal Pasca Monarki Konstitusional

Perubahan struktur kekuasaan di Nepal pasca runtuhnya sistem monarki konstitusional tidak hanya menandai pergeseran sistem pemerintahan menuju tatanan yang lebih demokratis, tetapi juga membuka ruang politik baru bagi kemunculan dan penguatan gerakan sosial sebagai aktor penting dalam proses transformasi politik Nepal. Dalam konteks tersebut, gerakan periode ini ditandai dengan menguatnya partisipasi masyarakat sipil,

meningkatnya tuntutan terhadap keadilan sosial, sebagai upaya rekonstruksi negara menuju sistem yang lebih inklusif dan representatif. Oleh karena itu, kajian mengenai gerakan sosial di Nepal pasca monarki konstitusional menjadi penting untuk dapat memahami dinamika hubungan antara negara, masyarakat dan kekuasaan dalam konteks demokrasi multipartai yang masih mengalami proses konsolidasi.

Menurut kajian Thapa (2024) perkembangan politik di Nepal pasca tahun 1990 dipicu oleh gerakan rakyat Jana Andolan I yang berlangsung dari bulan Februari hingga April 1990 di Kathmandu dan sejumlah wilayah lain yang ada di Nepal. Gerakan tersebut merupakan mobilisasi nasional yang telah berhasil mengakhiri sistem Panchayat serta membuka jalan bagi penerapan demokrasi elektoral. Namun demikian, kajian ini mengungkap bahwa periode pasca 1990 justru ditandai dengan munculnya ketidakstabilan politik, lemahnya kinerja pemerintahan di bawah kekuasaan serta terbatasnya keterlibatan kelompok sosial tertentu dalam proses pengambilan keputusan politik. Situasi tersebut kemudian turut melatarbelakangi munculnya gerakan bersenjata Maois (Perang Rakyat) yang diprakarsai oleh Partai Komunis Nepal (Maois) pada Februari 1996, dengan basis utama di daerah pedesaan Nepal bagian barat dan tengah, sebagai ekspresi perlawanan terhadap ketimpangan sosial serta kegagalan sistem representasi politik formal. Kumpulan krisis legitimasi demokrasi dan konflik tersebut kemudian turut serta berperan pada munculnya gerakan rakyat Jana Andolan II pada April 2006 yang berlangsung secara masif di Kathmandu dan berbagai kota besar yang ada di Nepal yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan monarki dan penghapusan sistem kerajaan pada tahun 2008. Meskipun kajian ini tidak secara spesifik membahas terkait gerakan sosial dalam kerangka media sosial, namun hasil dalam kajian ini dapat memberikan kerangka kontekstual yang kuat untuk memahami gerakan sosial di Nepal sebagai respons terhadap kegagalan institusional dan eksekusi politik dalam fase awal demokrasi multipartai (Thapa, 2024).

Dalam konteks perjuangan kelompok marjinal, Kharel dan Suji (2019) menganalisis dinamika gerakan sosial Dalit di Nepal pasca tahun 1990 dengan menitikberatkan pada permasalahan ketimpangan sosial dan pendekatan yang berbasis gender. Kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun demokrasi multipartai telah membuka ruang partisipasi politik secara formal, kelompok Dalit masih mengalami praktik diskriminasi struktural yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memicu terbentuknya gerakan kolektif jangka panjang yang berfokus pada penghapusan diskriminasi berbasis kasta serta penguatan posisi perempuan Dalit. Gerakan ini berkembang melalui peran organisasi masyarakat sipil, jaringan advokasi

dan aksi kolektif non-kekerasan. Kajian ini menegaskan bahwa gerakan sosial di Nepal pasca demokrasi multipartai tidak bersifat anarkis, melainkan diarahkan pada perubahan struktur melalui mekanisme partisipasi sosial dan politik yang damai (Kharel & Suji, 2019).

Kemudian menurut Dhakal (2015) melalui kajian *An Assessment of the Causes of the Madhesh Movement 2015* melihat bahwa gerakan Madhesh sebagai bagian dari keberlanjutan proses penguatan mobilisasi kolektif yang tumbuh setelah runtuhnya monarki absolut, terutama setelah terjadinya gerakan rakyat pada 2006. Terdapat dua fase utama dalam gerakan Madhesh yaitu Madhesh Andolan pertama yang berlangsung pada Januari hingga Februari 2007, serta Madhesh Andolan kedua yang terjadi pada September 2015 seiring dengan pengesahan konstitusi Nepal pada tanggal 20 September 2015. Fase kedua kemudian dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan terhadap pembatasan politik, diskriminasi sosial serta kultural, dan minimnya keterwakilan dalam struktur kekuasaan negara. Meskipun dalam perkembangannya gerakan ini disertai dengan meningkatnya kekerasan dan konflik di sejumlah wilayah, seperti di wilayah Birgunj, Tikapur dan Janakpur, Dhakal menegaskan bahwa gerakan Madhesh ini merupakan konflik politik yang terorganisasi dengan tuntutan utama berupa pengakuan identitas, legitimasi konstitusional dan keadilan sosial (Dhakal, 2018).

Pendekatan analitis yang lebih struktural kemudian ditawarkan oleh Chamlagai (2020) melalui kajian analisis komparatif atas dua gerakan Tarai/Madhesh yang berlangsung pada tahun 2007 dan 2015 dengan menggunakan kerangka struktur peluang politik. Gerakan Tarai/Madhesh I yang muncul pada Januari 2007 merupakan sebuah respons penolakan terhadap konstitusi sementara 2007 yang dinilai belum mengakomodasi tuntutan utama masyarakat Madheshi, seperti penerapan sistem federalisme, representasi politik yang proporsional serta pengakuan identitas sosial-budaya. Intensitas gerakan ini kemudian meningkat secara signifikan setelah terjadinya insiden penembakan terhadap seorang aktivis Madheshi pada 19 Januari 2007 yang kemudian diikuti oleh adanya aksi pemogokan umum pada 25 Januari 2007, hingga pada akhirnya dapat menghasilkan perubahan politik penting melalui amandemen konstitusi pada 12 April 2007 yang menetapkan Nepal sebagai negara federal. Sebaliknya, gerakan Tarai/Madhesh II yang berlangsung dari bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016 merupakan sebuah respons ketidakpuasan terhadap konstitusi Nepal 2015 yang disahkan pada 20 September 2015, utamanya adalah terkait pembentukan provinsi dan persoalan inggris. Meskipun gerakan tersebut telah ditandai dengan mobilisasi massa dalam skala yang luas serta adanya aksi blokade perbatasan sejak 23 September 2015,

gerakan tersebut berakhir tanpa adanya pencapaian politik yang berarti setelah dihentikan pada 4 Februari 2016 yang disertai dengan menguatnya konsolidasi elite politik yang secara kolektif menolak tuntutan dari gerakan ini. Chamlagai menegaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya mobilisasi massa, melainkan sangat dipengaruhi oleh sikap elite politik dan struktur kekuasaan yang ada (Chamlagai, 2020).

Perkembangan terbaru menunjukkan munculnya aktor generasi muda sebagai sebuah kekuatan baru dalam dinamika gerakan sosial di Nepal. Timalisina dan Shrestha (2025) menganalisis terkait gerakan Gen Z pada September 2025. Gerakan ini dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah Nepal pada awal September 2025 yang membatasi akses masyarakat terhadap 26 platform media sosial. Gerakan tersebut kemudian bertransformasi menjadi mobilisasi nasional yang berlangsung sepanjang bulan September 2025, dengan konsentrasi protes yang signifikan terjadi di wilayah perkotaan seperti Kathmandu, yang diiringi oleh penangkapan dalam jumlah besar, korban luka serta banyaknya korban meninggal dunia. Kajian ini menunjukkan bahwa gerakan Gen Z tidak semata-mata dipicu oleh permasalahan terkait kebebasan digital melainkan juga karena akumulasi ketidakpuasan struktural antara lain tingginya angka kemiskinan di berbagai kalangan terutama kalangan muda, meluasnya persepsi terhadap praktik korupsi, serta dominasi elite dan pola nepotisme yang dikenal dengan istilah “Nepo Kids”. Timalisina dan Shrestha menegaskan bahwa arah perkembangan dan pencapaian suatu gerakan sangat dipengaruhi oleh keberadaan politik tersembunyi, yang mencakup strategi kooptasi elite, pengendalian dan manipulasi narasi digital, manuver institusional negara serta tekanan geopolitik regional (Timalisina & Shrestha, 2025).

Sejalan dengan kajian sebelumnya, Kumar (2025) melihat posisi Gen Z sebagai aktor strategis dalam dinamika gerakan sosial serta protes pembentukan wacana demokrasi di Nepal pada fase pasca penerapan sistem demokrasi multipartai. Kajian ini menekankan pada keterlibatan kelompok muda yang lahir pada rentang 1997 hingga 2012 dalam beragam bentuk partisipasi politik, baik melalui aksi kolektif konvensional maupun melalui praktik aktivisme digital yang memanfaatkan media sosial. Kumar menunjukkan bahwa Generasi Z di Nepal semakin intensif dalam menggunakan platform digital seperti Facebook, Twitter (X), Instagram dan TikTok untuk mengekspresikan aspirasi politik, membangun kesadaran masyarakat serta mengkoordinasikan kampanye isu. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun Gen Z membawa energi, kreativitas dan nilai-nilai inklusif ke dalam ruang demokrasi Nepal, efektivitas gerakan mereka masih dibatasi oleh hambatan struktural serta

rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi politik serta kelangsungan antar generasi yang mengakar dalam sistem politik mutipartai Nepal (Kumar, 2025).

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial di Nepal pasca demokrasi multipartai mengalami perubahan yang signifikan baik dalam hal jumlah aktor yang terlibat, berbagai isu yang diperjuangkan maupun pola startegi yang diperjuangkan. Pada tahap awal, gerakan sosial di Nepal cenderung bertumpu pada mobilisasi massa konvensional yang dimulai dari konflik struktural dan tuntutan identitas kolektif. Namun, dalam perkembangannya yang semakin berubah dinamika gerakan sosial semakin ditandai dengan keterlibatan aktor muda dalam memanfaatkan media digital sebagai medium utama dalam menyampaikan aspirasi dan membangun konsolidasi gerakan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya masih memposisikan media sosial sebagai latar belakang pendukung dan bukan sebagai variabel analisis utama dalam gerakan-gerakan yang ada di Nepal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap gerakan sosial di Nepal serta menempatkannya dalam konfrontasi dengan konteks politik Indonesia.

2.3.1. Tabel Tinjauan Pustaka

No.	Penulis	Hasil Kajian	Jurang Kajian
1.	Thapa (2024); Kharel & Suji (2019); Dhakal (2015); Chamlagai (2020)	Gerakan sosial di Nepal muncul sebagai respons terhadap ketimpangan kasta, wilayah, identitas, serta kegagalan representasi politik dalam demokrasi multipartai. Keberhasilan gerakan mempengaruhi struktur peluang politik dan elite.	Kajian ini belum mengkaji peran media sosial dalam proses mobilisasi dan konsolidasi gerakan sosial di Nepal.
2.	Timalsina & Shrestha (2025); Kumar (2025)	Generasi Z menjadi aktor baru dalam gerakan sosial Nepal dengan memanfaatkan media sosial untuk koordinasi aksi, pembentukan wacana publik	Belum ada kajian yang menempatkan media sosial sebagai faktor penentu efektivitas gerakan

		dan mobilisasi partisipasi politik.	sosial, serta belum ada perbandingan dengan konteks negara lain seperti Indonesia.
--	--	-------------------------------------	--

Tabel 2.0.3.1 Tinjauan Pustaka.